

Legitimasi Masyarakat Internasional Terhadap Intervensi Kemanusiaan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 2011

Lindra Darnela

*Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
email: dbarnela@yahoo.com*

Abstract: Massive demonstrations that occurred since 2010 in several Arab countries (Arab Spring) sparked the attention of the UN Security Council to undertake humanitarian intervention, including in Libya which started in February 2011 with the use of armed force undertaken by NATO and some other big countries. Humanitarian intervention is a recommendation of the UN Security Council Resolution 1973 of 2011, under Chapter VII of the UN Charter, 1945. In doing humanitarian intervention, state and international organizations must have the recommendation of the UN Security Council, but the Security Council should also get legitimacy from the international community. Humanitarian intervention is also required to have humanitarian objectives to protect human rights. In this paper discusses the legitimacy given by the international community to the humanitarian intervention of the UN Security Council on Libya.

Abstrak: Demonstrasi besar-besaran yang terjadi sejak tahun 2010 di beberapa negara Arab (*Arab Spring*) memicu perhatian dari Dewan Keamanan PBB untuk melakukan intervensi kemanusiaan, termasuk di Libya yang dimulai pada Februari 2011 dengan menggunakan kekuatan bersenjata yang dilakukan oleh NATO dan beberapa negara besar lainnya. Intervensi kemanusiaan ini merupakan rekomendasi dari Resolusi 1973 DK PBB 2011, berdasarkan Bab VII Piagam PBB 1945. Dalam melakukan intervensi kemanusiaan, negara maupun organisasi internasional harus memiliki rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB, namun dalam hal ini Dewan Keamanan juga harus mendapatkan legitimasi dari masyarakat internasional. Intervensi kemanusiaan juga diharuskan memiliki tujuan kemanusiaan, yaitu untuk melindungi hak asasi Manusia. Dalam tulisan ini membahas mengenai legitimasi yang diberikan oleh masyarakat internasional terhadap intervensi kemanusiaan Dewan Keamanan PBB di Libya.

Kata kunci : *masyarakat internasional, intervensi kemanusiaan, PBB*

Pendahuluan

Intervensi kemanusiaan dengan menggunakan kekuatan (*use of force*) sering kali dilakukan terhadap negara yang sedang memiliki konflik dalam negeri. Intervensi ini dilakukan baik oleh satu negara, beberapa negara maupun beberapa negara atas nama organisasi internasional. Intervensi-intervensi tersebut terjadi tanpa adanya rekomendasi oleh PBB seperti yang dilakukan oleh Amerika kepada Irak pada tahun 2003, namun tidak jarang pula intervensi tersebut mendapatkan rekomendasi dari Dewan Keamanan Perserikatan bangsa-bangsa (DK PBB) sebagai pemegang otoritas dalam melakukan intervensi kemanusiaan berdasarkan hukum internasional saat ini. Intervensi tersebut seringkali diawali dengan munculnya Resolusi Dewan Keamanan PBB.

Intervensi kemanusiaan dengan Resolusi Dewan Keamanan, sebagaimana di atas, terjadi di beberapa negara Arab setelah ada gerakan yang dikenal sebagai *Arab Spring* yang diawali dengan adanya demonstrasi dari masyarakat kepada pemerintah yang sedang berkuasa yang terjadi sejak akhir tahun 2010 hingga sekarang. Pada saat tersebut, beberapa negara Arab menghadapi gelombang demonstrasi yang menuntut adanya reformasi di negara-negara tersebut, seperti Mesir, Tunisia, Bahrain, Yaman, Arab Saudi Libya, dan Suriah yang saat ini sedang bergejolak, serta beberapa negara lain di dunia Arab. Demonstrasi tersebut dilakukan baik dengan atau tanpa kekerasan.

Demonstrasi yang terjadi di Libya yang dimulai pada 17 Februari 2011 pun tak pelak melahirkan perang antar warganegara (*civil war*) antara kelompok oposisi yang menuntut turunnya Muammar Khadafi dari kursi presiden dengan kelompok loyalis Muammar Khadafi yang didukung oleh militer. Setidaknya, menurut Dewan Keamanan PBB, lebih dari 1.000 orang masyarakat sipil meninggal dunia dalam konflik ini akibat kekerasan yang dilakukan oleh Rezim Khadafi.¹

Pertempuran sengit dan berdarah terjadi tidak hanya di Tripoli, ibu kota negara, yang menjadi basis Muammar Khadafy, dan Benghazi, yang menjadi basis pertahanan oposisi. Perang saudara ini juga berlangsung di kota-kota strategis di Libya, seperti di Brega, kota minyak di Libya Timur, dan Misrata di Libya barat. Misrata adalah kota besar ketiga setelah Tripoli dan Benghazi. Bahkan, pertempuran juga

¹ "UN Security Council imposes sanctions against Gaddafi, associates", *Vanguard (Nigeria)*, 27 February 2011.

terjadi di Zawiyah, kota kilang minyak di Libya barat yang jaraknya 50 kilometer sebelah barat Tripoli, Libya.

Di sisi lain, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menanggapi konflik domestik di Libya yang terus meningkat tersebut dengan mengadopsi Resolusi 1973.² Resolusi tersebut diadopsi di bawah Bab VII Piagam PBB. Resolusi 1973 (2011) diusulkan oleh Prancis, Libanon dan Inggris,³ dan didukung oleh 10 suara, lima abstain, dan tanpa ada yang menentang. 10 pendukung Resolusi 1973 adalah tiga anggota permanen DK PBB yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis, dan 7 anggota tidak tetap DK PBB yaitu Bosnia Herzegovina, Kolombia, Gabon, Lebanon, Nigeria, Portugal, dan Afrika Selatan. Sedangkan negara yang abstain adalah 2 anggota tetap DK PBB yaitu Rusia dan Cina, dan tiga anggota tidak tetap DK PBB yaitu Jerman, Brasil, dan India.⁴

Berdasarkan pernyataan Dewan Keamanan PBB, negara-negara yang menyepakati Resolusi setuju bahwa dibutuhkan aksi yang tegas dalam rangka melindungi masyarakat sipil dari hal yang membahayakan mereka karena Rezim Khadafi telah melancarkan kekerasan-kekerasan terhadap masyarakat sipil yang menjadi kelompok oposisi yang berasal dari wilayah bagian Timur negara tersebut.⁵

Dalam waktu 42 jam sejak Resolusi 1973 (2011) diadopsi, militer Prancis mulai melancarkan serangan terhadap pasukan pemerintah Libya.⁶ Beberapa jam kemudian, kapal perang AS mulai menembaki rudal jelajah milik pasukan pemerintah Libya.⁷ Walaupun Arab dan negara-negara Muslim telah bergabung dalam koalisi tersebut, namun tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar berpartisipasi dalam serangan udara dengan mengirimkan pesawat. Setelah hari pertama pemboman ini, lebih dari empat lusin warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, dilaporkan meninggal karena penyerangan ini.⁸ Intervensi dengan menggunakan kekuatan militer ini dilakukan oleh

² 17 Maret 2011.

³ "Security Council authorizes 'all necessary measures' to protect civilians in Libya", United Nations News Centre, 17 March 2011.

⁴ "Libya: Nigeria votes in favour of no-fly resolution", *Vanguard (Nigeria)*. 18 March 2011.

⁵ *Ibid.*

⁶ Curtis Doebbler "Attacks on Libya and international law" diunduh dari http://thenewdawn.info/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=39 pada 20 Maret 2012.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

koalisi beberapa negara yaitu: Amerika, Prancis, Inggris dan organisasi NATO.

Berdasarkan teori intervensi kemanusiaan yang dirangkum oleh Teson, beberapa prinsip yang diterima sebagai alasan terjadinya intervensi kemanusiaan adalah: *pertama*, pemerintah merupakan agen dari individu. Oleh karena itu, hak internasional suatu negara berasal dari hak-hak dan kepentingan individu yang tinggal di suatu negara. Selain itu, berdasarkan prinsip *kedua*, Intervensi bisa dilakukan karena ada pemerintah yang anarki atau tirani dalam masyarakat yang hal tersebut berdampak pada kehidupan bermasyarakat dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Prinsip *ketiga* menyambung dari prinsip kedua yaitu, para korban tirani atau anarki harus menyambut adanya intervensi. Prinsip *keempat* menyatakan bahwa, Intervensi kemanusiaan harus mendapat persetujuan atau dukungan dari masyarakat di negara-negara demokratis dan dapat menciptakan demokratisasi di negara yang diintervensi.⁹ Jika prinsip-prinsip tersebut terpenuhi, maka intervensi kemanusiaan tersebut mendapatkan legitimasi.

Pokok masalah dalam tulisan ini adalah mengenai legitimasi intervensi kemanusiaan di Libya pada tahun 2011, yang kemudian dirumuskan dalam dua pertanyaan, yaitu:

1. Apakah intervensi kemanusiaan pada tahun 2011 di Libya mendapatkan dukungan dari masyarakat di Libya dan masyarakat Internasional?
2. Apa intervensi kemanusiaan di Libya pada tahun 2011 memiliki dampak bagi kehidupan beragama dan pemenuhan hak asasi manusia bagi masyarakat Libya pada saat ini?

Potret Intervensi Kemanusiaan di Libya

Konflik tahun 2011 terjadi setelah munculnya gerakan Musim Semi Arab (*Arab Spring*) yang berhasil meruntuhkan kekuasaan penguasa Tunisia dan Mesir. *Arab Spring* juga sampai ke Libya dengan mengubah daerah tersebut menjadi rentan terhadap subversi, pemberontakan dan revolusi.¹⁰ Seolah mendapatkan inspirasi, dari negara-negara tetangganya, Libya mengalami pemberontakan dalam

⁹ Fernando R. Teson, *Eight Principles for Humanitarian Intervention*, Journal of Military Ethics, Vol. 5, No. 2, 93-113, 2006, hlm. 1-5.

¹⁰ James Eliot Cross, *Conflict in the Shadow: the Nature and Politics of Guerrilla War*, (New York: Garden City, 1963).

skala penuh yang dimulai pada tanggal 17 Februari 2011.¹¹ Konflik ini dimulai ketika sekelompok pemuda di kota timur Benghazi pergi ke jalan untuk menuntut pembebasan tahanan politik dan reformasi politik. Pemerintah kemudian mengirim pasukan untuk menghancurkan para demonstran. Pengiriman pasukan dan penembakan terhadap para demonstran yang melakukan aksi secara damai tersebut memicu meningkatnya konflik dan akhirnya menyebabkan jatuhnya rezim Khadhafi.

Pada 20 Februari, kerusuhan menyebar sampai ke Tripoli. Pada tanggal 27 Februari 2011, Dewan Transisi Nasional (NTC) didirikan di bawah kendali pemberontak. Pada tanggal 10 Maret 2011, Perancis menjadi negara pertama yang secara resmi mengakui Dewan tersebut sebagai wakil sah rakyat Libya.¹²

Pada akhirnya, konflik di Libya melibatkan para pihak lokal yang terdiri dari pejabat rezim Presiden Khadhafi dan pemberontak pejuang NTC. Presiden Khadhafi mengklaim dirinya sebagai pemimpin Libya dan seorang revolusioner bukan hanya kepala negara. Pada awal konflik, rezimnya dikembalikan oleh tentara Libya namun tentara kemudian terbagi menjadi dua bagian yaitu yang loyal terhadap Khadhafi dan yang membelot dan bergabung dengan demonstran menjadi pejuang pemberontak NTC. NTC yang merupakan pejuang pemberontak ini terdiri dari milisi dan juga warga yang berubah menjadi pejuang dari berbagai kota.¹³ Pada tahap awal konflik, NTC ini bergabung dengan para pembelot dari tentara dan pejabat rezim. Milisi-milisi yang terbentuk selama perang sipil dan sebagian besar dari mereka melawan sesuai keinginan sendiri dan NTC memiliki kontrol dan pengaruh yang sedikit atas mereka. Para pejuang meminta Khadhafi mundur sebagai syarat untuk menyetujui negosiasi dipimpin oleh *African Union* (AU). Namun dalam hal ini, AU gagal melakukan intervensi untuk menemukan solusi damai untuk krisis di Libya, karena negosiasi tersebut tidak berhasil.

Pasukan pro Khaddafi kemudian merespon dengan tindakan militer terhadap kelompok pemberontak dan mendorong sampai bagian barat Libya, dan meluncurkan serangan balik di sepanjang

¹¹ "Live Blog – Libya", *Al Jazeera*, 17 February 2011, Retrieved 23 February 2011.

¹² <http://ntclibya.com/InnerPage.aspx?SSID=6&ParentID=3&LangID=1>, <http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12699183>.

¹³ Maggie Michael and Rami Al Shaheibi, "Moammar Gadhafi Loyalist Seize Libyan Town", *Associated Press*, 24th January, 2012.

pantai menuju Benghazi, yang merupakan pusat kekuasaan pemberontakan.¹⁴ Kota Zawiyah yang berjarak 48 kilometer (30 mil) dari Tripoli, dibombardir oleh pesawat angkatan udara, dan tank militer disita oleh tentara Jamahiriya.¹⁵

Beberapa organ PBB, termasuk Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon¹⁶ dan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengutuk tindakan keras tentara Libya tersebut dan menganggap sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional.¹⁷

AS dalam hal ini memiliki perhatian lebih terhadap konflik di Libya dan mulai intensif ketika James Clapper, Direktur Intelijen National mengatakan kepada Kongres AS di bulan Maret bahwa perlu adanya intervensi militer eksternal di Libya untuk menyelamatkan rakyatnya dari rezim Khadhafi. Sedangkan kepentingan Uni Eropa berkembang lebih luas pada saat Presiden Perancis, Nicolas Sarkozy mengusulkan untuk dilakukannya serangan udara di Libya dan pandangan tersebut disepakati oleh Perdana Menteri David Cameron. Konflik memperoleh perhatian lebih dari komunitas internasional ketika Liga Arab yang diwakili oleh Qatar melakukan banding, dan hal ini menyebabkan Dewan Keamanan PBB untuk memberlakukan zona larangan terbang (*no-fly zone*) di Libya.

No-fly zone yang ditetapkan berdasarkan Resolusi DK PBB 1973 ini, salah satunya muncul karena adanya pernyataan dari UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) yang dikutip oleh Sekjen PBB Ban Ki-Moon, bahwa ada sekitar 490.000 orang telah meninggalkan negara Libya sejak krisis dimulai. 2.700 diantaranya menyeberang ke Tunisia dan Mesir setiap hari, dan ada sekitar 330.000 orang yang masih terlantar.¹⁸ Oleh karena itu, untuk menyelamatkan mereka maka harus dilakukan upaya-upaya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Piagam PBB.

Pada tanggal 17 Maret 2011 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1973 dengan 10 suara dan lima abstain

¹⁴ Fahim, Kareem; Kirkpatrick, David D. (9 March 2011). "Qaddafi Forces Batter Rebels in Strategic Refinery Town", *The New York Times*.

¹⁵ The Independent, 9 March 2011 P.4.

¹⁶ "Ban Ki-moon blasts Gaddafi; calls situation dangerous", *Hindustan Times* (New Delhi), 24 February 2011.

¹⁷ "Some backbone at the U.N.", *The Los Angeles Times*, 26 February 2011.

¹⁸ UN Secretary-General Ban Ki-moon's statement on the next steps in implementing Security Council resolution 1973 (2011) to the Libya Contact Group in Doha, Qatar, 13 April 2011.

termasuk Rusia dan China. Resolusi tersebut berisi pembentukan zona larangan terbang dan penggunaan "segala cara yang diperlukan" untuk melindungi warga sipil Libya.¹⁹ Tiga hari setelah diadopsinya Resolusi 1973 Dewan Keamanan PBB, beberapa Negara besar yaitu Amerika Serikat, Inggris dan Perancis dengan bantuan NATO, melakukan pengeboman di beberapa kota yang menjadi titik strategis pemerintahan Libya, dengan amanat Resolusi DK PBB 1973 yang memberlakukan *no fly zone* di teritorial Libya.

Pada tanggal 19 Maret tersebut, tindakan pertama yang dilakukan oleh sekutu NATO untuk mengamankan zona larangan terbang, adalah dengan menghancurkan pertahanan udara Libya. Dimulai ketika jet militer Perancis memasuki wilayah udara Libya pada misi pengintaian dan serangan terhadap sasaran musuh.²⁰ Pada minggu-minggu berikutnya, pasukan Amerika berada di garis terhadap operasi NATO di Libya ini. Lebih dari 8.000 personel Amerika dikerahkan di kapal perang dan pesawat di beberapa wilayah. Tindakan ofensif Amerika yang dipersenjatai dengan bom bom enam belas 2000-pon, terbang keluar dan kembali ke basis mereka di Missouri pada daratan Amerika Serikat.²¹ Sehingga dalam hal ini, dukungan yang diberikan oleh Pasukan udara NATO lah yang menjadi poin penting dalam keberhasilan dari revolusi ini.

Pada 22 Agustus 2011, para pemberontak memasuki Tripoli dan menduduki Green Square,²² yang mereka ganti namanya menjadi "Lapangan Martir" dalam rangka menghormati orang-orang yang tewas sejak 17 Februari 2011. Jatuhnya Tripoli pada tanggal 23 Agustus adalah titik signifikan dalam konflik ini. Pemberontak NTC melakukan serangan dari semua sisi kota yang dilindungi oleh serangan udara NATO supaya pasukan Khadhafi menarik diri. Para pejuang kemudian dengan cepat merebut kendali kekuasaan Khadhafi dan akhirnya jatuhlah rezim orang kuat terakhir di Arab ini.²³ Pemboman NATO ini

¹⁹ "Security Council authorizes 'all necessary measures' to protect civilians in Libya" (Press release), United Nations, 17 March 2011.

²⁰ Marcus, Jonathan, (19 March 2011). "French military jets open fire in Libya", *BBC News*, Retrieved 20 August 2011.

²¹ John Tirpak, "Bombers Over Libya", *Air Force Magazine: Journal of the Air Force Association*, Vol. 94, No. 7, July 2011, diunduh tanggal 26 Juni 2014.

²²

http://mideastafrica.foreignpolicy.com/posts/2013/02/11/the_hidden_story_of_air_power_in_libya

²³ Reid Roberth H., "Arab strongman: with Gadhafi death, an era passes" *Associated Press/AP*, Saturday, October 22nd 2011.

terus dilakukan sampai ke Sirte dimana Khadhafi saat itu telah mundur dan menghilang. Pada pagi tanggal 20 Oktober satu dari serangan NATO menghantam konvoi Khadhafi di luar Sirte dan sebagian dari mereka mencoba untuk melarikan diri ke tempat kelahirannya, namun para pemberontak kemudian menggunakan senjata api untuk menyerang karena kelompok Khadhafi melarikan diri dengan berjalan kaki.²⁴ Mereka sempat bersembunyi, sebelum Khadhafi terluka dan ditangkap di Drain.²⁵ Pada tanggal 20 Oktober 2011, pertempuran sengit terjadi lagi di kota Sirte sampai jatuhnya Sirte, dan hal ini menjadi akhir dari pemberontakan. Pada saat itu, NTC yang diwakili oleh Mahmoud Jibril secara resmi mengumumkan bahwa Khadhafi telah tewas dalam baku tembak yang diikuti dengan penangkapan oleh pasukan revolusioner.²⁶

Kekalahan pasukan loyalis tersebut dirayakan pada tanggal 23 Oktober 2011, tiga hari setelah jatuhnya Sirte. Namun ketika itu, setidaknya ada 30.000 orang warga Libya yang tewas dalam perang saudara.²⁷

Libya Pasca Intervensi Kemanusiaan

Sejak kekalahan pasukan loyalis, Libya menjadi negara yang pecah, ketika daerah satu dengan yang lainnya bersaing dan berafiliasi satu dengan yang lainnya, antar kota dan suku. Sementara pemerintah pusat tidak lagi memiliki kewenangan yang kuat. Persaingan antara milisi ini melawan satu dengan yang lainnya dengan tujuan politik antara politisi Islam dan lawan-lawannya.²⁸ Pada tanggal 7 Juli 2012, Libya melakukan pemilihan suara untuk parlemen yang pertama kalinya sejak berakhirnya rezim sebelumnya. Pada tanggal 8 Agustus 2012, Dewan Transisi Nasional secara resmi menyerahkan kekuasaan sepenuhnya GNC atau Kongres Nasional Umum terpilih, yang

²⁴ Karadsheh Jomana, "Top aide: Gadhafi Suicidal flight to birth place" *CNN.com*, November 8th 2011.

²⁵ Meikle James, "Muammar Gaddafi is dead, says Libyan PM" *guardian.co.uk*, Thursday 20th October 2011.

²⁶ Basu Moni and Smith Matt, "Gadhafi killed in crossfire after capture Libyan PM says", *CNN.com* October 21st 2011.

²⁷ <http://www.guardian.co.uk/world/feedarticle/9835879>, Laub, Karin (8 September 2011). "Libyan estimate: At least 30,000 died in the war". *The Guardian* (London). Associated Press.

²⁸ <http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-24985595>.

bertugas untuk membentuk pemerintah sementara dan menyusun sebuah konstitusi baru yang akan disetujui dalam referendum.²⁹

Pada tanggal 25 Agustus 2012, seperti yang dilaporkan oleh Reuters, terjadi apa yang disebut dengan "serangan sektarian yang paling mencolok" sejak berakhirnya perang saudara, yaitu penyerangan terhadap masjid dan kuburan para Sufi pada siang hari di tengah ibukota Libya, Tripoli.³⁰

Pada tanggal 11 September 2012, terjadi serangan lagi di Benghazi, di mana militan Islam telah berhasil menyerang konsulat Amerika di Benghazi dan membunuh duta besar Amerika untuk Libya, J. Christopher Stevens.

Pada tanggal 7 Oktober 2012, Perdana Menteri Libya terpilih, Mustafa AG Abushagur mengundurkan diri,³¹ dan pada tanggal 14 Oktober 2012, Kongres Nasional Umum memilih seorang pengacara dan anggota hak asasi manusia, Ali Zeidan sebagai perdana menteri.³² Zeidan dilantik setelah kabinetnya disetujui oleh GNC. Namun pada tanggal 11 Maret 2014, setelah digulingkan oleh GNC karena ketidakmampuannya untuk menghentikan pengiriman minyak ilegal,³³ Perdana Menteri Zeidan akhirnya mengundurkan diri, dan digantikan oleh Perdana Menteri Abdullah al-Thani.³⁴

Pada tanggal 16 Mei 2014 terjadi serangan di Benghazi yang dipimpin oleh Khalifa Haftar, dengan target kelompok-kelompok militan Islam yang tinggal di dalam kota. Serangan ini dilakukan tanpa izin dari pemerintah pusat. Haftar menjuluki operasi militer anti-Islam ini sebagai *Operation Dignity*. Sebagai bagian dari operasi ini, pada tanggal 18 Mei 2014 di Tripoli, gedung parlemen diserbu oleh pasukan

²⁹ Esam Mohamed (8 August 2012), "Libya's transitional rulers hand over power", Boston.com. Associated Press.

³⁰ Zargoun, Taha (25 August 2012), "Fighters bulldoze Sufi mosque in central Tripoli", Reuters.

³¹ Grant, George (7 October 2012). "Congress dismisses Abushagur". *Libya Herald*, Zaptia, Sami (7 October 2012). "Abushagur announces a smaller emergency cabinet". *Libya Herald*, <http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-19864136>.

³² Grant, George (14 October 2012), "Ali Zidan elected prime minister". *Libya Herald*.

³³ David D Kirkpatrick (17 March 2014). "U.S. Navy SEALs Take Control of Diverted Oil Tanker", New York Times.

³⁴ "Libya ex-PM Zeidan 'leaves country despite travel ban'", =BBC. 12 March 2014.

yang setia kepada Haftar.³⁵ Haftar mengaku akan membersihkan beberapa anggota pemerintah Libya yang diindikasikan merupakan militan Islam radikal yang bisa menjadi teroris yang diduga terpengaruh dari luar negeri. Dia telah menyatakan bahwa Dewan Nasional Umum harus dibubarkan, dan kemudian membentuk sebuah pemerintahan yang terpilih tanpa ada hubungan dengan milisi Islam. *Operation Dignity* ini telah disambut dengan pawai dan demonstrasi dukungan yang dihadiri oleh ribuan warga Libya di Tripoli, Benghazi dan di kota-kota Libya lainnya.³⁶

Beberapa hari setelah tanggal 25 Mei, yaitu sampai tanggal 5 Juni, Perdana Menteri Abdullah al-Thani mengundurkan diri dan digantikan oleh Ahmed Maiteeq. Pengunduran diri ini terjadi setelah keluarga al-Thani diancam dan diserang oleh kelompok bersenjata.³⁷ Dengan tujuan untuk memadamkan kekerasan, maka dilakukan pemilihan parlemen yang diadakan pada tanggal 25 Juni 2014,³⁸ meskipun hanya diikuti oleh kurang dari setengah penduduk yang memiliki hak pilih, sehingga hal ini mencerminkan adanya ketidakpastian yang sedang berlangsung mengenai sistem politik Libya.³⁹ Pada tanggal 26 Juni 2014, tak lama setelah pemilu, Salwa Bughaighis, seorang pengacara hak asasi manusia di Benghazi, yang merupakan kritikus dari Muammar Khadafi dan beberapa milisi Islam yang menggulingkan dia, dibunuh di rumahnya.⁴⁰

Pada tanggal 26 Juni, GNC mengumumkan bahwa Perwakilan Rakyat akan berkantor pusat di Benghazi. Anggota parlemen ini bertugas pada bulan Januari untuk menyusun konstitusi baru dan ditempatkan di kota Beida, sebelah timur dari Benghazi. Namun pada tanggal 1 Agustus 2014, terjadi perpindahan kantor dari Tripoli ke Benghazi yang dimaksudkan untuk menjamin warga di bagian Timur,

³⁵ Mahjar-Barducci, Anna (16 April 2014). "Libya: Restoring the Monarchy?". *Gatestone Institute*, "Rogue General's Troops Storm Libyan Parliament", Sky News, 18 May 2014.

³⁶ Kouddous, Sharif (24 May 2014), "Thousands march for 'dignity and reforms'", Dubai: Gulf News.

³⁷ Frizell, Sam (13 April 2014), "Libya PM Quits, Says He Was Targeted in Armed Attack", *Time*.

³⁸

<http://www.heraldglobe.com/index.php/sid/222161387/scat/2411cd3571b4f088/h t/Libya-to-hold-elections-in-a-bid-to-defuse-violence>.

³⁹ Reuters, Tripoli 26 June 2014 "Poor turnout in Libyan parliament vote".

⁴⁰ <http://www.bbc.com/news/world-africa-28031537>.

bahwa mereka adalah anggota dari negara Libya sama pentingnya dengan yang di Barat.⁴¹

Pada tanggal 2 Juli 2014, Perdana Menteri Abdullah al-Thani membuat negosiasi untuk perjanjian penyelesaian dengan faksi yang memegang port minyak yang sebelumnya ditutup karena adanya pertikaian antar faksi. Perjanjian yang ditengahi oleh Al-Thani ini berhasil menyepakati untuk dibuka kembalinya dua pelabuhan minyak utama di negeri ini, dan dengan demikian mengakhiri krisis minyak di negara itu.⁴² Pemerintah pada saat itu masih lemah dengan adanya milisi saingan yang berkuasa di beberapa bagian negara. Pemerintah juga berencana untuk meminta dukungan internasional dalam menstabilkan negara, dan mengutus menteri luar negeri untuk menyampaikan keinginan tersebut dengan mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa Libya telah menjadi "negara yang gagal".⁴³ Ketika situasi keamanan semakin memburuk, negara-negara Barat mulai menutup misi diplomatik mereka dan mengevakuasi warganya. Kedutaan Amerika Serikat dan Perancis ditutup pada akhir Juli 2014, sementara kedutaan Inggris ditutup pada awal Agustus 2014.⁴⁴ Dengan demikian, tidak ada lagi dukungan dari luar negeri, sehingga kekacauan masih saja terjadi sampai pada tanggal 12 Agustus 2014, kepala Kepolisian Tripoli, Kolonel Mohammed Sweissi dibunuh oleh seseorang yang menggunakan topeng dan bersenjata.⁴⁵

Legitimasi dalam Intervensi Kemanusiaan di Libya

Dalam hal ini, intervensi kemanusiaan didefinisikan sebagai "legitimasi penggunaan kekuatan oleh negara-negara terhadap negara lain untuk tujuan mengurangi penderitaan manusia di wilayah tersebut."⁴⁶ Sedangkan legitimasi berasal dari kesepakatan umum bahwa

⁴¹ <http://www.reuters.com/article/2014/06/26/us-libya-elections-idUSKBN0F12CH20140626#comments>.

⁴² <http://www.reuters.com/article/2014/07/02/us-libya-oil-idUSKBN0F72LZ20140702>.

⁴³ <http://www.africaleader.com/index.php/sid/223948597/scat/c1ab2109a5bf37ec/ht/Fighting-escalates-over-Tripoli-airport-in-Libya>.

⁴⁴ <http://uk.reuters.com/article/2014/08/02/uk-libya-security-idUKKBN0G206820140802>.

⁴⁵ <http://www.heraldglobe.com/index.php/sid/224686845>.

⁴⁶ Lihat: Maya Stanulova, "Has Humanitarian Intervention Become an Exception to the Prohibition on the Use of Force in Article 2(4) of the UN Charter" the University of Edinburgh.

masyarakat internasional harus melakukan intervensi di negara yang penduduknya mengalami penderitaan akibat dari pelanggaran hak asasi manusia. Penderitaan penduduk ini memerlukan intervensi kemanusiaan disebabkan oleh adanya kekerasan yang meluas baik karena aksi otoritas negara,⁴⁷ atau karena negara tidak mampu melawan para pelaku tindakan ini dan meminta bantuan.⁴⁸ Kasus-kasus pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia ini memiliki unsur "mengejutkan kesadaran umat manusia"⁴⁹ sehingga mewajibkan masyarakat internasional untuk melakukan campur tangan. Dengan demikian, intervensi kemanusiaan tidak mewajibkan adanya hubungan antara korban dan negara-negara yang melakukan intervensi⁵⁰ yang menekankan perlunya persetujuan dan dukungan internasional. Mengenai perlindungan warga negara di luar negeri, meskipun sering dihubungkan dengan intervensi kemanusiaan, namun bukan bagian dari doktrin intervensi kemanusiaan ini.⁵¹

Mengenai hal ini, ketika melihat kejadian di Libya, nampak bahwa tujuan dari intervensi kemanusiaan ini dilakukan bukan untuk menyelamatkan korban dari kekejaman kemanusiaan dan alasan-alasan lain sebagaimana disampaikan di atas, namun memiliki tujuan utama yaitu untuk merubah rezim.

Analisa ini didukung dengan adanya statement yang disampaikan oleh Cina dan Rusia atas sikap abstain yang mereka ambil ketika adanya dukungan terhadap Resolusi 1973 (2011), yang menjadi pintu masuk dilakukannya intervensi kemanusiaan. Mereka mengklaim bahwa pasukan NATO telah melampaui mandat mereka untuk menegakkan zona larangan terbang, dan telah meningkat aksi mereka menjadi salah satu menegakkan perubahan rezim. Dalam hal ini, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa Rusia dan Cina mengeluh bahwa mereka telah ditipu oleh Barat, yang menurut mereka, sekutu NATO tidak berlaku jujur dengan mengkonversi R2P menjadi instrumen perubahan rezim.⁵²

⁴⁷ R. B. Lillich, 'Forcible Self-Help by States to Protect Human Rights' (1967-1968) 53 Iowa Law Review, hlm 325-332.

⁴⁸ *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v United States of America)*, Merits, Judgment, ICJ Reports 1986, hlm. 14.

⁴⁹ R. B. Lillich, 'Forcible Self-Help', hlm. 332.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ R. B. Lillich, 'Humanitarian Intervention through the United Nations: Towards the Development of Criteria', 1993, 53 Zaoc RV, hlm. 557-560.

⁵² Michael Emerson, From Libya to Syria - the responsibility to protect,

Jatuhnya pemimpin Libya Muammar Khadhafi bisa dikatakan sebagai kemenangan yang signifikan kebijakan luar negeri untuk Presiden AS Barack Obama. Dengan menetapkan strategi sementara untuk memungkinkan seseorang mengimplementasikan yang menjadi tanggung jawabnya, pemerintahan Obama mencapai tujuan jangka pendeknya untuk menghentikan kekejaman Khaddafi dan tujuan jangka panjang yang salah satunya untuk menyingkirkannya dari kekuasaan. Hal tersebut dilakukan dengan biaya keuangan yang minim, tanpa keterlibatan pasukan AS di lokasi, dan tanpa ada korban dari AS dengan norma *Responsibility to Protect* (RtoP)⁵³. Kekalahan rezim Khadhafi ini menjadi sejarah baru dalam intervensi kemanusiaan.

Intervensi ini dilakukan setelah munculnya Resolusi DK PBB 1970 dan 1973 yang menetapkan zona larangan terbang. Zona larangan terbang ini mendapat dukungan dari para anggota Liga Arab, Organisasi Konferensi Islam (IOC), dan *Gulf Cooperation Council*, termasuk dukungan terhadap penggunaan “segala cara yang diperlukan” untuk mencegah kekejaman massal.⁵⁴

Selain itu, China dan Rusia, dua anggota tetap Dewan Keamanan (DK PBB) menolak untuk mengizinkan intervensi militer berdasarkan Bab VII Piagam PBB. Namun dalam hal ini, kedua negara tersebut tidak memiliki hubungan khusus dan kepentingan dengan Libya, sehingga mereka tidak punya alasan untuk memveto tindakan kolektif, meskipun pada akhirnya mereka menyesal. Dengan kasus Libya ini, menunjukkan bahwa intervensi RtoP telah diterapkan dengan baik,

interventionism and regime change, Times.am – Armenian news, December 1st, 2011: <http://times.am/?l=en&p=2161>, diakses tanggal 10 Juli 2014.

⁵³ *Responsibility to Protect* merupakan dokumen penting yang dibuat oleh International Commission on Intervention and State Sovereignty, yang mencoba untuk mengambil pendekatan baru terhadap intervensi kemanusiaan. Prinsip-prinsip utama yang dituangkan dalam dokumen tersebut adalah: kedaulatan negara menyiratkan tanggung jawab, dan tanggung jawab utama untuk melindungi rakyatnya terletak pada negara itu sendiri. Ketika penduduk suatu negara menderita kerusakan yang serius, sebagai akibat dari perang saudara, pemberontakan, represi atau kegagalan negara, dan negara yang dimaksud tidak mau atau tidak mampu menghentikan atau mencegah hal itu, maka prinsip non-intervensi menghasilkan tanggung jawab dunia internasional untuk melindungi. *The Responsibility to Protect: Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty*, Ottawa, International Development Research Centre, Desember 2001. Lihat juga di <http://iciss-ciise.gc.ca>.

⁵⁴ <http://www.foreignaffairs.com/articles/68233/stewart-patrick/libya-and-the-future-of-humanitarian-intervention>, diakses tanggal 10 Juli 2014.

meskipun tanpa keyakinan bahwa Amerika Serikat dan sekutunya akan menerapkannya secara universal.

Meskipun penggulingan Khadhafi berdasar pada gagasan RtoP, namun penerapan norma tersebut tetap selektif dan sangat bergantung pada konteks politik. Hal yang mencolok dalam kasus Libya adalah kepemimpinan vokal pemerintahan Obama dalam upaya mengkonsolidasikan RtoP sebagai norma global yang penting, sangat kontras dengan sikap dari pemerintahan Bush. Sikap dari Washington terhadap RtoP ini sangat penting, karena Amerika Serikat adalah satu-satunya negara dengan kekuatan dan kredibilitas untuk benar-benar menegakkan intervensi tersebut. Untuk menegaskan bahwa kondisi di Libya memungkinkan dilakukannya RtoP, maka pada tanggal 4 Agustus 2011, pemerintahan Obama merilis *President Study Directive* tentang Kekejaman Massa (PSD-10). Dokumen ini mendefinisikan pencegahan kekejaman massal baik sebagai "kepentingan untuk keamanan nasional dan tanggung jawab moral yang inti dari Amerika Serikat." PSD-10 merupakan dokumen inovatif yang oleh Direktur Senior NSS, Samantha Power, dijadikan argumen untuk dilakukannya intervensi di Libya.⁵⁵

Sesuai dengan analisa dari Anagnostou, seorang pakar hukum internasional, menyatakan bahwa intervensi di Libya ini memiliki tujuan yaitu kampanye terhadap anti Khaddafi. Hal ini kemudian dimanipulasi oleh media dan dikontrol oleh pihak-pihak yang berusaha untuk membunuh pemimpin di Libya. Ini merupakan pukulan bagi hukum internasional selain kejadian di Serbia dan Irak.⁵⁶

Untuk melihat legitimasi masyarakat internasional dalam intervensi kemanusiaan di Libya ini, maka perlu melihat pro dan kontra dalam pelaksanaan intervensi yang dilakukan oleh NATO dengan dukungan DK PBB ini.

Menurut BBC, Resolusi 1973 DK PBB tidak akan datang pada saat tersebut jika karena tidak ada daya tarik dari Liga Arab.⁵⁷ Bab j, dari resolusi tersebut diamanatkan oleh Perancis, Italia dan Inggris

⁵⁵ <http://www.foreignaffairs.com/articles/68233/stewart-patrick/libya-and-the-future-of-humanitarian-intervention>, diakses tanggal 3 Agustus 2014.

⁵⁶ Peter Anagnostou, Libya: Where international law died, <http://theredtelephone.wordpress.com/2011/03/07/libya-where-international-law-died/> diakses tanggal 10 Agustus 2014.

⁵⁷ BBC, "British Spokesman warns Libyan officials against continuing to support Gadhafi" *BBC Monitoring Middle East*. London. 20th March 2011. BBC Monitoring Middle East 2011, diakses tanggal 10 Agustus 2014.

untuk menjaga wilayah udara Libya dengan tujuan untuk memastikan bahwa Khadhafi tidak menggunakan angkatan udaranya sehingga menyebabkan kematian sipil.⁵⁸ Sedangkan menurut sebuah artikel di BBC yang dipublikasikan oleh BBC Monitoring European London pada tanggal 24 Maret 2011, menyatakan bahwa negara-negara anggota Uni Eropa pada awalnya khawatir terhadap penolakan AU dengan adanya intervensi militer, namun Italia dan Jerman dalam hal ini mengusulkan sebuah inisiatif gencatan senjata yang dipantau oleh PBB untuk membangun cara untuk melakukan bantuan kemanusiaan. Untuk melakukan hal tersebut, Turki yang akan memainkan peran utama. Hal tersebut dilakukan dengan indikasi pengiriman Khadhafi ke tempat pengasingan. Inisiatif tersebut disetujui dengan *roadmap* AU berperan pada resolusi konflik, namun dalam hal ini, Jerman memilih abstain ketika ada pemungutan suara di PBB mengenai intervensi di Libya, sedangkan Turki menentang intervensi asing dan tetap menolak pada awal berlakunya *no-fly zone*.

Dalam konflik di Libya ini, sebagaimana disampaikan di atas, Rusia dan Cina memilih tidak mengambil suara dalam Resolusi PBB 1973 karena menurutnya, hal tersebut bukan merupakan kepentingan mereka. Dua Negara tersebut mendukung inisiatif AU untuk mencari jalan damai dan tidak sepakat dengan pemboman yang dilakukan oleh NATO. Bahkan menurut AFP, dalam pertemuan DK PBB di New York tanggal 12 Januari 2012, kedua negara mengajukan tuduhan dan mengeluh kepada Dewan Keamanan PBB bahwa serangan udara NATO di Libya telah melanggar Resolusi PBB.⁵⁹ Jika saja negara anggota AU di DK PBB memilih untuk tidak menyepakati Resolusi DK PBB 1973, maka hanya ada sedikit kesempatan bagi resolusi tersebut untuk dapat lulus dengan adanya bukti yang ditunjukkan oleh Rusia dan Cina dalam keberpihakannya kepada AU, dengan menggunakan hak veto mereka seperti yang mereka lakukan di Darfur Sudan. Namun, hal tersebut tidak terjadi sehingga Resolusi 1973 tetap dikeluarkan tanpa adanya hak veto.

Mengenai respon dari masyarakat Libya mengenai intervensi kemanusiaan ini, secara umum mereka tidak setuju dengan tindakan tersebut karena menurut mereka tidak memberi dampak lebih baik dengan tindakan negara-negara tersebut. Sebaliknya, mereka

⁵⁸ Sasa Mabasa, Mugabe 'the Party needs me' *New African* 508, July 2011, hlm. 58-64.

⁵⁹ AFP, tanggal 12 Januari, 2012.

membayangkan bahwa negara mereka akan menjadi negara yang maju dan lebih kuat seperti Dubai jika tidak terjadi intervensi tersebut. Sistem pemilihan presiden yang dihasilkan dari penurunan rezim Khadafi ini, tidak berpengaruh bagi masyarakat karena mereka tidak akan mau memilih presiden yang baru karena loyalitasnya terhadap presiden yang sebelumnya.

Menurut Mowafg Masfuq, salah seorang warga Libya yang saat ini berada di Indonesia, tujuan akhir dari adanya intervensi kemanusiaan ini adalah bukan semata-mata masalah minyak atau uang semata, meskipun pada dasarnya menurut dia, negara-negara yang melakukan intervensi sebetulnya memiliki uang. Namun dalam hal ini, tujuannya bukan hanya masalah uang.⁶⁰ Ketika terjadi konflik di Iraq, Mesir, Libya dan kemudian Suriah, hal ini menjadi indikasi adanya agenda lain, terlebih lagi ketika Mesir dapat ditaklukan oleh Al-Qaeda. Dalam hal ini, ia menyimpulkan bahwa PBB sebenarnya mendukung Al-Qaeda. Logikanya adalah, ketika Al-Qaeda memiliki negara seperti Iraq dan Suriah, maka Libya pun akan bergabung dengan mereka, yang hal ini berarti keadaan Libya akan seperti 5000 tahun yang lalu. Menjadi pertanyaan selanjutnya adalah mengenai tujuan PBB ketika mendukung Al-Qaeda, dan hal ini membutuhkan penelitian dan pembahasan tersendiri.

Dalam hal ini, bisa diartikan bahwa intervensi kemanusiaan di Libya tidak mendapatkan legitimasi dari masyarakat Libya, karena tidak mendapat dukungan dari masyarakat secara umum, dan juga penolakan dari beberapa negara dan lembaga internasional. Intervensi yang dilakukan bisa jadi mendapatkan legalisasi dari dewan keamanan PBB namun tidak memenuhi rasa keadilan dan pengesahan dari masyarakat internasional, terutama warga masyarakat Libya, sehingga dalam hal ini, tidak memiliki legitimasi.

Pengaruh Intervensi Kemanusiaan terhadap Kehidupan Beragama dan Hak Asasi Manusia

Sebelum terjadi konflik yang mengakibatkan turun tangannya Dewan Keamanan PBB, masyarakat Libya menikmati kemakmuran dari negaranya. Semua penduduk tidak lagi memikirkan kebutuhan untuk hidup karena semua dicukupi oleh pemerintah. Negara Libya merupakan negara yang cukup makmur meskipun 90% wilayahnya terdiri dari gurun pasir. Kemakmuran negara ini didapat dari hasil

⁶⁰ Wawancara dengan Mowafg Masfuq, tanggal 20 Agustus 2014.

minyak bumi yang dikelola sendiri oleh pemerintah. Bahkan, menurut seorang responden, harga bensin di Libya lebih murah 3 kali lipat daripada air mineral kemasan.⁶¹

Di Libya, seseorang yang memiliki dua mobil, dikategorikan sebagai kelompok miskin, karena semua penduduk disana rata-rata memiliki banyak kendaraan mewah. Di Libya juga tidak ada rumah sakit swasta dan semua biaya pengobatan dari masyarakat berapapun besarnya, ditanggung oleh pemerintah melalui rumah sakit negara. Selain itu, masyarakat bisa mengenyam pendidikan secara cuma-cuma sampai tingkat doktor. Makanan seperti daging, harganya sangat murah untuk ukuran masyarakat Libya. Bahkan daging ayam bagi mereka merupakan camilan saja. Hal ini menunjukkan betapa makmurnya masyarakat Libya sebelum terjadinya konflik. Meskipun demikian, masyarakat pada masa itu, tidak bisa melakukan tindakan yang menentang kekuasaan Khadhafi sebagai rezim yang berkuasa di sana. Mereka bisa bicara apa saja, tetapi tidak bisa bebas melakukan apa saja. Maka dalam hal ini, masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk bertindak, namun bagi mereka hal tersebut tidak menjadi masalah, termasuk sistem diktator yang dilakukan oleh pemimpin mereka, selama membawa kesejahteraan untuk rakyatnya.

Dalam hal ini, ditemukan bahwa keadaan setelah terjadinya intervensi kemanusiaan, adalah lebih buruk daripada sebelum terjadinya intervensi. Ketika konflik terjadi antara oposisi dan loyalis Khadafi, yang terjadi adalah perebutan kekuasaan dengan tujuan meruntuhkan kekuasaan rezim Khadafi yang sudah berkuasa lama di Libya. Oposisi melakukan penyerangan dan pemberontakan, menuntut lahirnya pemimpin baru yang dihasilkan dari proses demokrasi, dan hal tersebut memakan korban cukup banyak. Menurut laporan, ada 1000 orang yang meninggal akibat bentrokan antara oposisi dan loyalis Khadhafi, yang kemudian mendapat respon dari Dewan Keamanan PBB. Namun jika dibandingkan dengan kondisi setelah terjadinya intervensi kemanusiaan, kondisinya lebih parah pada saat ini. Menurut Salah seorang warga Libya mengatakan bahwa :

In the last 4 years, Human Rights violence is worse. It is like Iraq case. The problem is when you dont have state/government. When you check in internet, more than 100 people killed in one day. They kill each other among trabe. Most western embassy close. Why? US Ambassador was killed. Each trabe only look for money. They do not care to kill each other among muslim in the country. In Libya, 100%

⁶¹ Wawancara dengan Mowafq Masfuq, tanggal 20 Agustus 2014.

*muslim sunni. You donot need to talk Islam. For what? Some of them support ISIS. Eastern part is oil resources. Maybe they will be independent.*⁶²

Dari pernyataan Mowafq ini dapat disimpulkan bahwa keadaan di Libya saat ini nampak tidak ada lagi hukum yang ditegakkan, bahkan saat ini, 100 orang masyarakat Libya terbunuh tanpa diketahui siapa pelakunya. Hukum internasional yang memberikan perlakuan istimewa dan perlindungan terhadap duta besarpun tidak lagi ditegakkan di tanah Libya ini, sebagaimana yang terjadi pada kasus terbunuhnya duta besar Amerika di Libya.

Konflik yang terjadi sampai saat ini merupakan konflik horizontal sama-sama oposisi yang motifnya tidak berkaitan dengan masalah agama namun masalah uang, dan karena itulah masing-masing mereka saling membunuh. Motif dari Kelompok oposisi ini terdiri dari kelompok muslim sekular, kelompok persaudaraan muslim dan Al-Qaeda. Penduduk Libya ini terdiri dari 100 muslim Sunni, sehingga kecenderungan terjadinya konflik agama, sangat minim.

Dampak lain dari intervensi kemanusiaan yang direkomendasikan oleh Dewan Keamanan PBB ini, terjadi beberapa peristiwa penting yang menjadi dampak dari peristiwa tersebut, diantaranya sebagai berikut:

1. Ada kemungkinan besar bahwa Libya menjadi pecah. Contoh pada 6 Maret 2012, setelah peringatan satu tahun revolusi, pemimpin sipil di Cyrenaica yaitu bagian timur Libya yang mengandung 80% dari minyak Libya dengan hanya 20% penduduknya menyatakan otonomi di wilayah mereka.⁶³ Juga di Misrata, sebagai kota industri dan jantung ekonomi Libya⁶⁴ dengan adanya Perusahaan Minyak Nasional Libya yang menjadi salah satu Perusahaan minyak terbesar dunia, telah membentuk zona keamanan yang melarang banyak penduduk Libya lain untuk memasuki kota tersebut. Mereka mengadakan pemilihan dewan kota pertama mereka pada bulan Februari 2012 tanpa keterlibatan National Transitional

⁶² Wawancara dengan Mowafq Masfuq, tanggal 20 Agustus 2014.

⁶³ Fetouri Issam, "Eastern Libya defies Tripoli to create autonomous" *REUTERS*. Africa. www.af.reuters.com/article/topNews/idAFJJOE82506H20120306. Tuesday 6th March 2012 Fetouri 2012.

⁶⁴ Simba Russeau, "Politics: Balkanisation of Libya" *Global information Network*. New York, May 13th 2011.

- Council (NTC) atau Dewan Transisi Nasional yang saat ini mengatur Libya.⁶⁵
2. Berlanjutnya konflik militer dan pertempuran antar antara milisi dari waktu ke waktu. Para milisi di kota-kota lain yang terbentuk selama revolusi untuk melawan Khadhafi sampai saat ini masih menolak untuk melucuti senjatanya meskipun revolusi dinyatakan selesai. Mereka masih mengontrol wilayah mereka dengan bersenjata lengkap dan Dewan Transisi Nasional yang dipimpin oleh Abdul Jalil masih belum bisa mengendalikan mereka.
 3. Terjadinya penyebaran senjata dari Libya yang kemudian diselundupkan ke luar negeri selama perang sipil. Beberapa dari senjata mereka mungkin tidak akan pernah ditemukan oleh NTC. Sehingga Angkatan bersenjata bisa kalah oleh teroris atau pemberontak separatis di Afrika. Contoh terjadi di Mali pada tanggal 22 Maret 2012, ketika tentara pembelot merebut kekuasaan menggulingkan Presiden Amadou Toumani Toure. Pada saat itu militer menyatakan perlu untuk mencari senjata yang lebih baik untuk melawan pemberontak Utara Tuareg yang didukung oleh sekutu etnis bersenjata yang melarikan diri setelah melawan Khadhafi.⁶⁶ Mereka tidak puas dengan Presiden Toure dalam menangani peluncuran pemberontakan pada Januari 2012. Para pemberontak Tuareg menyatakan kemerdekaannya pada awal April 2012. Masalah ini juga bisa mempengaruhi tetangga Libya lainnya seperti Chad, Sudan, Nigeria, Aljazair dll
 4. Para migran dari Sub-Sahara Afrika bisa menjadi target saat mereka kembali ke Libya karena beberapa kali dikatakan berjuang untuk Khadhafi sebagai tentara bayaran selama perang. Hal ini sering disorot oleh Media Barat dan melaporkan dari Libya pada saat konflik.
 5. Khadhafi masih memiliki beberapa orang yang setia kepadanya baik di dalam maupun di luar negeri. Orang-orang ini bisa mendanai dan mendukung kelompok-kelompok yang ingin memulai serangan balik terhadap NTC atau pemerintahan yang akan datang di Libya. Contohnya ketika Bani Walid sebagai

⁶⁵ Stephen Chris (2012) "Libyan Leader vows to keep nation together by force", *guardian.co.uk*. Wednesday 7th March 2012 Stephen 2012.

⁶⁶ David Lewis and Diallo Tiemoko (2012) "Soldiers say they seize power in Mali" *REUTERS*. *Africa*. <http://af.reuters.com/article/topNews/idAFJJOE82L06520120322>. Thursday March 22nd 2012.

- kelompok orang-orang yang loyal terhadap Khadhafi berkumpul kembali dan merebut kota dari kekuatan NTC⁶⁷ dan mengibarkan bendera hijau rezim Khadhafi, yang kemudian dikecam oleh pemerintah sementara NTC.
6. Masih banyaknya bahan peledak yang masih berada di tanah Libya yang sebelumnya digunakan pada mas perang baik oleh NATO, Khadhafi atau pemberontak NTC. Hal ini mengancam kehidupan dan rusaknya bangunan. Banyak penduduk yang meninggal karena menemukan bahan peledak dan ketika akan membuangnya, namun membunuh mereka. Banyak anak-anak yang menjadi korban dari peledakan ini.
 7. Menambah frekuensi konflik lintas batas dan peningkatan perdagangan manusia (*trafficking*)
 8. Pejabat yang bekerja di bawah rezim Khadhafi dan sekarang melayani Pemerintah NTC diperkirakan dapat memicu rakyat Libya kembali ke jalan dengan upaya untuk menghilangkan mereka jika NTC terus menggunakan mereka. Beberapa pemuda yang memulai demonstrasi dan berjuang dalam revolusi tidak ingin melihat mantan staf Khadhafi di kantor-kantor tinggi pemerintahan.

Beberapa dampak tersebut diatas dan berdasarkan fakta yang terjadi setelah intervensi kemanusiaan, hal ini menunjukkan bahwa kondisi di Libya saat ini lebih buruk dari pada kondisi sebelum adanya intervensi kemanusiaan, sehingga tujuan dari intervensi kemanusiaan untuk sebagai *Responsibility to Protect*, menjadi tidak terpenuhi.

Penutup

Tulisan ini menyimpulkan dua hal terkait intervensi kemanusiaan di Libya pada tahun 2011, sebagai mana berikut ini:

1. Intervensi kemanusiaan pada tahun 2011 di Libya tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat di Libya, sehingga dalam hal ini bisa dikatakan bahwa intervensi kemanusiaan di Libya tidak memiliki legitimasi yang sah sebagaimana prinsip-prinsip dalam melakukan intervensi kemanusiaan. Hal ini disimpulkan dari ketidaksepakatan masyarakat Libya dengan adanya intervensi tersebut. Mereka lebih memilih untuk tetap berada dalam rezim sebelumnya. Adapun pihak yang sepakat terhadap intervensi

⁶⁷ Maggie Michael and Rami Al Shaheibi (2012) "Moammar Gadhafi Loyalist Seize Libyan Town" *Associated Press*. 24th January, 2012.

tersebut adalah kelompok pemberontak yang kemudian menjadi Dewan Transisi Nasional, yang akhirnya di antara mereka saling bersaing.

2. Intervensi kemanusiaan di Libya pada tahun 2011 tidak memiliki dampak bagi kehidupan beragama karena ada ataupun tidak adanya intervensi ini tidak mempengaruhi kehidupan beragama mereka. Masyarakat Libya merupakan penganut agama Islam sunni, dan tidak ada konflik karena perbedaan pandangan agama, dan mereka merasa bahwa konflik yang terjadi bukan karena agama. Namun dalam hak asasi mereka, intervensi ini memberi dampak yang signifikan pada pemenuhan hak-hak asasi tersebut. Setelah intervensi dilakukan, konflik berubah menjadi konflik horizontal yang melibatkan antar kelompok masyarakat dan hal ini terjadi semakin intensif dan sporadis. Ketika sebelum terjadinya intervensi kemanusiaan, masyarakat Libya tercerabut hak-hak politiknya terutama dalam melakukan tindakan yang berbeda dengan kehendak rezim Khadafi, namun setelah itu hak-hak dasar manusia seperti rasa aman dan hak hidup menjadi tercerabut. Dengan demikian, intervensi kemanusiaan membawa dampak buruk bagi keberlangsungan masyarakat Libya.

Daftar Pustaka

- Caron, David D, *Governance and Collective Legitimation in the New World Order*. Makalah disampaikan pada the Conference Commemorating the 70th Anniversary of the AAA yang dilaksanakan di Hague, 19-21 Juli 1993.
- Chynoweth, Paul, *Advanced Research Methods in the Built Environment*, United Kingdom: Wiley-Blackwell, 2008.
- Glennon, M. J., *Why the Security Council failed*. In *Foreign Affairs*, Vol. 82. No. 3, 2003.
- Hall, A., *Treatise on International Law*, (ed., A. Pearce Higgins, 1924). Oxford: the Clarendon Press, 1895.
- Hall, Mark A. and Wright, Ronald F., *Systematic Content Analysis of Judicial Opinions* (June 30, 2006). Wake Forest Univ. Legal Studies Paper No. 913336; California Law Review, Vol. 96, 2008

- Hehir, Aidan, *Humanitarian Intervention: An Introduction*, Macmillian: Pargrave, 2010.
- Heinze, Eric A., *Waging Humanitarian War: The Ethics, Law, and Politics of Humanitarian Intervention*, New York: State University of New York Press, 2009.
- Hellmann, Anja, *The Ethical Dilemma of Non-forcible Humanitarian Intervention: Utilitarian vs. Kantian Approach*, Norderstedt Germany: Grin Verlag, 2010.
- Holsti, K.J., *International Politics: A Framework for Analysis*, Englewood Cliffs, Prentice-Hall International, 1988.
- Holzgrefe, J. L. dan Robert O. Keohane (editor), *Humanitarian intervention: Ethical, Legal, and Political Dilemmas*, New York: Cambridge University Press, 2003.
- Hurd, Ian, *After Anarchy: Legitimacy & Power in the United Nations Security Council*, New Jersey: Princeton University Press, 2007.
- Kochler, Hans, "Humanitarian Intervention in the Context of Modern Power Politics", Research paper first presented at the China Institute of Contemporary International Relations in Beijing, pada tanggal 22 Desember 2000. Vienna: International Progress Organizations Studies in International Relations XXVI, 2001.
- Malanczuk, Peter, *Humanitarian intervention and the Legitimacy of use of Force*, Amsterdam: Het Spinhuis, 1993.
- Mitrany, David, *A Working Peace System*, London: Institute of International Affairs, 1943.
- Moore, Jonathan (editor), *Hard Choices: Moral Dilemmas in Humanitarian Intervention*, New York: Rowman & Littlefield, 1999.
- Pattison, James, *Humanitarian intervention and the Responsibility to Protect, Who Should Intervene?*, New York: Oxford University Press Inc, 2010.
- Rüdiger, Wolfrum (editor), *Legitimacy in International Law*, Germany: Springer, 2008.
- Scheffer, David J, "Toward a Modern Doctrine of Humanitarian Intervention" University of Toledo Law Review, 1992.

- Suchman, M. C. "Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches", *Academy of Management Journal*, Vol. 20, No. 3, 1995, *Journal of International Affairs*, 37, 1984.
- Teson, Fernando R., "*Collective Humanitarian Intervention*", 17 *University of Michigan Law School Journal*, 1996.
- Teson, Fernando R., *Humanitarian Intervention: An Inquiry Into Law and Morality*, second Eddition, New York: Transnational Publisher, Irvington-Hudson, 1997.
- Teson, Fernando, *Humanitarian Intervention*, edisi kedua, New York: Transnasional Publishers, 1992.
- The Journal of Political Philosophy*: Volume 7, Number 1 1999.
- Walling, Carrie Booth, *The United Nations Security Council and Humanitarian intervention: Causal Stories about Human Rights and War*, A Dissertation Submitted to the Faculty of the graduate school of the University of Minnesota, 2008.
- Walzer, Michael, *Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations* (3rd ed.), New York: Basic Books, 2000.
- Watts, A., "The Importance of international Law", in M. Byers (ed), *The Role of International Law in International Politics*, Oxford: Oxford University Press, 2001.
- Wolfrum, Rüdiger dan Volker Röben (editor), *Legitimacy in International Law*, Germany: Springer, 2008.
- Piagam PBB/ UN Charter (1945)
- S/RES/1970 (2011)
- S/RES/1973 (Mar, 17, 2011).
- International Covenant on Civil and Political Rights (1996)
- Additional Protocol I of Geneva Convention 1949 (1977)
- <http://www.guardian.co.uk/world/2011/oct/20/muammar-gaddafi-dies-city-birth>, 20 October 2011
- <http://www.newadvent.org/cathen/07398a.htm>
- "UN Security Council imposes sanctions against Gaddafi, associates". *Vanguard (Nigeria)*. 27 February 2011.

"*Did diplomacy succeed or fail in Libya?*" E-International Relation, Daryl Morini, April, 12 2012. <http://www.e-ir.info/2011/04/12/did-diplomacy-succeed-or-fail-in-libya/>

"UN Security Council slaps sanctions on Libya". *Times of India*. 27 February 2011.

"India backs UN sanctions against Libya". *Times of India*. 27 February 2011.

"Security Council authorizes 'all necessary measures' to protect civilians in Libya". United Nations News Centre. 17 March 2011.